

**PROSPEK PENGEMBANGAN PROGRAM
STRATEGIS DALAM KAITANNYA KERJASAMA
PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH**

oleh
Manuwoto

Makalah Disampaikan dalam Lokakarya
"Pengabdian pada Masyarakat LPM IPB dan Penyusunan
Program Kegiatan dengan Pemerintah Daerah Kerjasama,"
Tanggal 13 - 14 Januari di IPB, BOGOR

**PROSPEK PENGEMBANGAN PROGRAM STRATEGIS
DALAM KAITANNYA KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMDA**

oleh
Manuwoto ¹⁾

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi sampai saat ini masih menjadi salah satu tumpuan harapan bagi keberhasilan pembangunan nasional. Dengan Tri Dharma-nya, perguruan tinggi diminta untuk dapat melaksanakan sekaligus fungsi-fungsi pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Oleh karena itu disamping mempunyai tugas pengembangan keilmuan, peningkatan mutu pendidikan dan mencetak tenaga profesional, perguruan tinggi juga dihadapkan pada tugas dan tanggung jawab untuk ikut memikirkan pembinaan secara langsung nasib bangsa dan masyarakat Indonesia. Dengan ikut bertanggung jawabnya perguruan tinggi terhadap pembinaan masyarakat dan bangsa, maka kehadiran perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah sangatlah dibutuhkan sesuai dengan berbagai masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Kerja sama yang dilakukan antara perguruan tinggi dengan pemerintah dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, antara lain perguruan tinggi merupakan pemasok tenaga ahli bagi lembaga pemerintah, atau pemerintah meminta tenaga pengajar dari perguruan tinggi untuk

1) Kepala Biro Regional I, BAPPENAS

menjadi pejabat di suatu lembaga pemerintahan seperti yang selama ini dilakukan oleh berbagai instansi. Disamping itu juga dengan adanya permintaan pemerintah kepada perguruan tinggi untuk ikut memecahkan berbagai permasalahan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan. Keuntungan dari kerjasama ini cukup banyak, antara lain perguruan tinggi dapat mempraktekkan berbagai teori dari berbagai cabang ilmu pengetahuan secara langsung untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dengan demikian dapat diketahui kendala-kendala yang ada, serta berbagai jalan pemecahan yang dimungkinkan sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Dalam makalah singkat ini ingin dielaborasi mengenai beberapa hal tersebut di atas yang mungkin ada gunanya nanti dibahas lebih lanjut.

KERJASAMA PERGURUAN TINGGI DENGAN PEMERINTAH

Dalam penjelasan pasal 22 ayat (1) UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diutarakan bahwa pengembangan perguruan tinggi diarahkan pada kemampuan menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Walaupun demikian dapat disadari bahwa pada kenyataannya tidak semua perguruan tinggi dapat menyelenggarakan tugas pengabdian pada masyarakat secara langsung. Bagi perguruan tinggi yang dapat secara langsung berhubungan dengan masyarakat banyak, maka tugas ini dapat terus dikembangkan dan ditingkatkan sejalan dengan peningkatan kemampuan perguruan tinggi tersebut.

Harus disadari bahwa perguruan tinggi merupakan pusat keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perguruan tinggi mempunyai andil yang besar dalam memberikan sumbangan-sumbangan pemikiran bagi pengambilan keputusan dan penentuan kebijaksanaan oleh pemerintah. Dengan adanya tugas dan tanggung jawab tersebut maka perguruan tinggi dilain pihak juga diharapkan dapat selalu meningkatkan sumber daya manusia melalui peningkatan keahlian dari para tenaga pengajarnya. Disamping itu perguruan tinggi juga harus selalu berusaha untuk meningkatkan fasilitas untuk mendukung aktivitasnya.

Kerjasama antara perguruan tinggi dan pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, sangat diperlukan guna membantu mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah atau wilayahnya. Perguruan tinggi dengan pengalaman akademisnya, dengan wawasannya yang luas diharapkan juga dapat membantu pemerintah dalam memprediksi keadaan yang akan dihadapi oleh suatu daerah dan wilayah dalam masa yang akan datang. Hal ini dapat dilakukan dengan membantu menyusun rencana dan program jangka panjang, menengah maupun jangka pendek. Atau dengan kata lain perguruan tinggi dapat membantu pemerintah di dalam menyusun program-program strategis untuk pembangunan di suatu daerah.

Bentuk kerjasama lainnya yang mungkin ada antara lain adalah memberikan supervisi ilmiah dengan keahlian teknis dan manajemen dalam pelaksanaan proyek-proyek pembangunan seperti yang selama ini

sudah dilakukan. Misalnya seperti oleh IPB dalam program kaji tindak, KKN atau sejenisnya. Ke dua program tersebut juga mempunyai manfaat yang positif bagi para dosen dan mahasiswa sebagai suatu pengalaman dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada di lapangan.

Kerja sama ini kiranya masih perlu ditingkatkan mengingat beban tugas yang dihadapi oleh lembaga pemerintahan semakin berat, sedangkan dilain pihak Sumber Daya Manusia di lembaga pemerintahan sangat terbatas dan beban kerja sehari-hari yang membatasi gerak aparat pemerintah. Bahkan sampai saat ini seandainya datanya tersedia, maka dapat diyakini bahwa nilai kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi maupun antara lembaga pemerintahan di pusat dengan perguruan tinggi sangat besar dan akan terus meningkat.

Disamping kerjasama yang menyangkut supervisi ilmiah dalam pengambilan keputusan dan pengambilan kebijaksanaan, perguruan tinggi juga sampai saat ini dan dimasa yang akan datang masih diharapkan untuk menjadi cermin hati nurani masyarakat, yang bersikap kritis terhadap kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Segala peranan tersebut tentunya tidak harus mengabaikan peranan utama perguruan tinggi sebagai lembaga ilmiah yang menghasilkan manusia-manusia profesional dan peneliti-peneliti yang bermutu.

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DALAM PELAKSANAAN KERJASAMA

Didalam menjalin kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi ini tentu terdapat beberapa masalah, baik yang berasal dari pemerintah sendiri maupun dari perguruan tinggi. Dari pihak pemerintah masalah yang mungkin selalu harus dihadapi adalah birokrasi yang ada yang sering kali tidak selalu menguntungkan bagi kelancaran kerjasama dengan perguruan tinggi. Masalah seperti korespondensi, pengesyahan dokumen, dan prosedur pencairan anggaran merupakan sebagian kecil masalah yang menyebabkan kelambatan-kelambatan didalam kerjasama yang ada. Bagi pihak perguruan tinggi mungkin masalah-masalah birokrasi ini seringkali sulit untuk dimengerti dan diterima. Pertanyaannya adalah seberapa jauh prosedur-prosedur birokratis ini dapat disederhanakan sehingga kepentingan dan keuntungan kedua belah pihak tetap dapat dipertahankan atau bahkan ditingkatkan.

Di pihak lain dapat pula dirasakan berbagai masalah yang ada di pihak perguruan tinggi yang harus dihadapi oleh pihak pemerintah adalah umumnya berpangkal pada perbedaan persepsi di dalam melihat dan menganalisa suatu permasalahan. Pemerintah yang harus selalu siap dengan program-program yang segera bisa dilaksanakan biasanya kekurangan waktu untuk mencerna suatu masalah secara analitis yang mendalam. Perguruan tinggi di lain pihak dengan wawasan akademisnya yang lebih jauh, dapat melihat masalah tersebut dalam konteks yang mungkin lebih luas, walaupun seringkali menjadi sulit untuk

dilaksanakan pemecahannya sebelum ada pendalaman yang memakan waktu. Hal ini tentunya amat menyulitkan bagi pihak pemerintah yang memerlukan saran-saran nyata yang harus segera bisa dilaksanakan di lapang.

Disamping masalah-masalah utama yang disebutkan di atas, sudah barang tentu terdapat masalah lain yang terlalu banyak apabila disebutkan dalam makalah ini satu persatu. Akan tetapi dalam kesempatan diskusi ini mungkin lebih baik dicari jalan keluar yang paling efektif untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Dalam hal ini yang dapat diusulkan adalah meningkatkan komunikasi, tukar pendapat dan pandangan terhadap berbagai masalah-masalah aktual yang dihadapi oleh kedua belah pihak. Komunikasi perlu ditingkatkan dalam arti tidak hanya interaksi dalam pertemuan-pertemuan formal seperti rapat-rapat ataupun seminar-seminar, tetapi juga dalam bentuk kunjungan lapang bersama antara staf dari pemerintah dan staff dari perguruan tinggi. Dengan jalan ini dua belah pihak dapat bertukar pikiran dan menyamakan persepsi untuk suatu masalah secara langsung di tempat dan di pusat di mana masalah itu berada.

KESIMPULAN

Dalam menjalankan fungsi Tridharma-nya yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, maka perguruan tinggi mempunyai peranan yang besar dalam membantu tugas-tugas pemerintah. Dalam hal ini perguruan tinggi dapat berperan sebagai pemasok tenaga

ahli yang diperlukan, melakukan berbagai analisa untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan, supervisi ilmiah dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, serta berbagai macam bentuk kerjasama lainnya yang dimungkinkan.

Berbagai masalah yang ada dalam pelaksanaan kerjasama dapat disebutkan di sini, seperti hambatan birokrasi di pihak pemerintah dan perbedaan persepsi terhadap kedalaman suatu masalah di suatu tempat dan untuk waktu tertentu. Walaupun demikian berbagai masalah ini dapat dicarikan jalan keluarnya, antara lain melalui peningkatan komunikasi antara pemerintah dan perguruan tinggi baik melalui forum-forum yang formal seperti rapat, lokakarya dan seminar, maupun yang kurang formal seperti kunjungan lapang bersama. Satu hal yang mungkin tidak dapat dipungkiri ialah bahwa peranan perguruan tinggi dalam kaitannya dengan pelaksanaan program-program pembangunan oleh pemerintah akan selalu besar. Kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi dengan demikian perlu terus ditingkatkan.